

Analisis Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mianahasa

Pradipta Mandasari Parasan¹, Chrisna Riane Opod², Stephanie Mervin Tooy³

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 5 Desember 2023

Revised: 15 Desember 2023

Accepted: 31 Desember 2023

Keywords:

Government Expenditure

Economic Growth

ABSTRACT

Keberhasilan pembangunan yang ada di suatu negara atau daerah bisa tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam mendorong pembangunan sendiri pemerintah berupaya meningkatkan belanja pemerintah yang di harapkan dapat mendorong perputaran ekonomi yang ada di daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Peningkatan belanja pemerintah khususnya yang ada di daerah, seharusnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. terutama di kabupaten Minahasa . Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan menguji pengaruh dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten Minahasa. Data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu data pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah yang ada di kabupaten Minahasa, Selanjutnya, dalam analisis ini, digunakan metode regresi linier sederhana dengan eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan, hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif. Hal ini di sebabkan karena belanja yang di alokasikan oleh pemerintah masih banyak bersifat investasi misalnya di bidang infrastruktur yang dampaknya tidak langsung di rasakan pada waktu sekarang namun dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulisan lebih lanjut tentang hubungan antara Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa dan juga untuk pemerintah daerah setempat dalam hal pengambilan kebijakan.

The success of development in a country or region can be reflected in high economic growth. In encouraging its own development, the government is trying to increase government spending, which is expected to encourage economic turnover in the region, increase economic growth, and improve community welfare. High government spending should be able to influence economic growth in the region, especially in Minahasa district. For this reason, the present study will minimize the impact of government policy on economic growth in the province of Minahasa. The data used in this study are the economic and government data available in the province of Minahasa. Subsequently, the analysis in this study employs the method of regression line analysis using eviews 12.. The research results show that government spending and economic growth have a positive relationship, but the influence of government spending on economic growth does not have a significant effect. This is because the spending allocated by the government is still largely investment in nature, for example, in the infrastructure sector, the impact of which is not immediately felt now but over a long period of time. It is hoped that this research can contribute to developing literature related to government expenditures on economic growth in Minahasa Regency.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Pradipta Mandasari. Parasan

Department of Economics Development, Universitas Negeri Manado,

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Tondano, Sulawesi Utara

Email: pradiptaparan@unima.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam wujud terjadinya suatu pembangunan yang berkelanjutan di butuhkan sinkronisasi dan juga tekad yang besar dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimana keberhasilan suatu pembangunan juga mengindikasikan keberhasilan suatu negara maupun suatu daerah, dalam hal ini pembangunan yang ada di Indonesia pemerintah sudah melaksanakan otonomi daerah yang di harapkan daerah mampu mengelola keuangan nya sendiri untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Indikator keberhasilan dalam pembangunan salah satunya dapat di ukur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses mengubah kondisi ekonomi suatu negara secara bertahap menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Ketika tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya, perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan (Romi Daniel Tuwo, dkk 2021), Dengan desentralisasi fiskal, yang berarti pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan membuat perencanaan perekonomian sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penduduk lokal, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perencanaan yang lebih baik, karena dalam hal ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk pengalokasian anggaran salah satunya belanja pemerintah agar program pembangunan ekonomi yang sudah tersusun dapat tercapai sehingga pembangunan ekonomi di daerah terlaksana secara optimal dan menciptakan kesejahteraan masyarakat (Meilissa, dkk 2021)

Menurut Sukirno (2013), pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrument anggaran. Pengeluaran pemerintah dibutuhkan untuk menambah modal fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, serta untuk peningkatan layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketertiban dan ketentraman, dan lingkungan hidup, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rosen, 2014; Sukirno, 2013). Hal-hal yang di upayakan pemerintah tersebut sejatinya untuk menggairakan perekonomian yang ada di daerah tersebut agar nantinya dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka kesejahteraan. Data Belanja Pemerintah di Sulawesi Utara, terutama di kabupaten Minahasa, cenderung meningkat setiap tahunnya, seperti yang ditunjukkan pada data di bawah ini:

Tabel 1. Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa 2012-2022

Tahun	Belanja Pemerintah
2012	774,511,064
2013	859,741,870
2014	897,660,415
2015	1,128,598,692
2016	1,333,332,721
2017	1,346,641,126
2018	1,338,206,697
2019	1,361,100,503
2020	1,431,636,113
2021	1,251,476,918,127
2022	1,312,341,477,079

Source: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Bisa dilihat dari data bahwa 2012-2017 belanja pemerintah kabupaten minahasa terus meningkat setiap tahun nya, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan namun tidak begitu besar yaitu pada angka 1,338,206,697. Kemudian Kembali naik ditahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Ini menunjukan pemerintah terus menambah alokasi anggaran untuk belanja pemerintah yang di harapkan selain memenuhi semua kebutuhan yang ada di daerah namun juga mendorong terus Bergeraknya

Pertumbuhan Ekonomi. Bisa di lihat juga data Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Kabupaten Minahasa dari tahun ke tahun lewat data berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa 2012-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2012	6,53
2013	6,2
2014	6,39
2015	6,17
2016	6,06
2017	6,07
2018	6,1
2019	5,77
2020	1,03
2021	3,96
2022	5,47

Source: BPS Kabupaten Minahasa

Data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa sangat berfluktuasi dari tahun 2012 hingga 2017. pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten minahasa selalu berada di angka di atas 6%. Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa mulai menurun pada tahun 2019, turun menjadi 5,77%, dan pada tahun 2021, turun menjadi -1,03. hal ini di karenakan pandemi covid19 yang melanda di Indonesia maupun dunia, setelah itu pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi mulai kembali naik pada angka 3,96%, dan pada tahun 2022 sudah berada pada angka 5.67%.

Dari data yang ada, besarnya anggaran dan naiknya anggaran yang di alokasikan dari tahun ke tahun untuk belanja pemerintah diharapkan dapat mempengaruhi laju nya pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indicator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Untuk itu peneliti ingin melihat dengan anggaran belanja pemerintah yang setiap tahun nya mengalami peningkatan apakah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten minahasa, dalam penelitian kali ini penulis ingin meneliti mengenai Analisis Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang ada di Kabupaten Minahasa. Melalui penelitian (Romi, dkk 2021), melihat hubungan antara pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah berdampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan hasil analisis regresi berganda. Sebaliknya, belanja modal berdampak negatif dan tidak signifikan.. Kemudian (Meilissa, 2021) melalui penelitiannya analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif jawa timur juga dengan menggunakan *Panel Vector Correction Model (PVECM)* Dalam model analisisnya, dia menemukan bahwa belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, PDB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka berkontribusi sebesar 47% pada pertumbuhan ekonomi inklusif. (Wahyudi, 2020) meneliti tentang Pengeluaran Pemerintah dan impikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Dalam penelitiannya, dilakukan menggunakan model analisis linier berdanda, menunjukkan bahwa, meskipun pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara signifikan.

Penelitian yang di lakukan penulis ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya terutama dalam objek penelitian maupun lokasi yang di pilih, dimana Penelitian ini di lakukan di kabupaten Minahasa, selain itu terletak pada variable-variabel penelitian di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya dari sisi pengeluaran pemerintah peneliti sebelumnya hanya mengambil beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrasturktur dll, sedangkan dalam penelitian ini mengambil variable dan keseluruhan dari aspek belanja pemerintah. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan juga bisa memberikan masukan kepada pemerintah dalam proses pembangunan yang ada di daerah agar dapat memperhatikan alokasi belanja pemerintah yang bersifat *mandatory spending* yang bisa

mendorong perputaran ekonomi yang baik dan akhirnya bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat.

KAJIAN TEORI

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Sukirno 2015), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan fiskal produksi barang dan jasa yang relevan di suatu negara; ini termasuk peningkatan infrastruktur, jumlah sekolah, produksi barang modal, dan produksi industri. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan, jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi biasanya dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada indikator lain, seperti distribusi pendapatan. Faktor faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi menurut (Sukirno 2006) yaitu: Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, Tanah dan kekayaan alam lainnya, Barang-barang modal dan tingkat teknologi, serta Sistem sosial dan sikap masyarakat.

Dua ekonom yang mengikuti Keynes, Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod, mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar., mereka menganggap bahwa perekonomian berada dalam kondisi pekerjaan penuh, atau penuh tenaga kerja, dan bahwa sumber daya modal masyarakat digunakan secara penuh. Menurut teori pertumbuhan ekonomi ini, ada dua bagian yang membentuk perekonomian: sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jika proporsi tabungan masyarakat dibandingkan dengan pendapatan nasional, fungsi tabungan dimulai dari nol. Jika rasio anatar modal output (COR) adalah rasio modal output, dan rasio pertambahan modal output (ICOR) adalah rasio pertambahan modal output, kecenderungan seseorang untuk menabung MPS adalah kecenderungan yang konstan untuk menabung. Teori ini menyatakan bahwa, jika ingin mengalami pertumbuhan perekonomian harus menabung dan atau menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari total outputnya. Semakin banyak tabungan yang kemudian di investasikan, akan membuat semakin cepat perekonomian tersebut akan tumbuh (Lincolyn, 2004).

Teori Pertumbuhan Ekonomi dari J.M Keynes, menurut Keynes iya setuju bahwa untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi, kebijakan moneter dan fiskal harus digunakan. Konsep Keynesian menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi pasar tampaknya sulit untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan sering menyebabkan instability, inequity dan inefiiciency. Ketidakmerataan, ketidakefisienan, dan ketidakstabilan ekonomi jelas akan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. (Curatman, 2010).

Belanja Pemerintah

Menurut (Mankiw 2020), pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian suatu negara.

Nurmainah (2013) menyatakan bahwa peran belanja pemerintah sangat penting di negara berkembang karena peran swasta dalam perekonomian terbatas. untuk hal itu peran pemerintah sangat penting. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno 2000) yakni upaya pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pengukuran penerimaan dan pengeluaran tahunan, yang ditunjukkan dalam APBN nasional dan APBD regional. Kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat output, dan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Mankiw dan Parkiw, 2014) menunjukkan bahwa belanja negara, salah satu alat pemerintah yang klasik yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Belanja modal memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena akan meningkatkan tingkat produktifitas penduduk dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, yang ditunjukkan dalam pendapatan per kapita. (Romi, dkk 2021). Hubungan positif

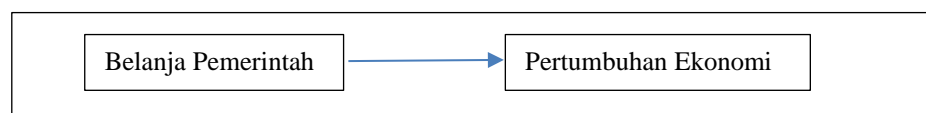
terlihat antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dimana ketika terjadi alokasi anggaran dalam belanja pemerintah akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, karena belanja yang termasuk dalam belanja pemerintah ini merupakan belanja dalam hal pengembangan daerah di bidang infrastruktur, kesehatan, Pendidikan, dll dalam rangka kemandirian daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut (Ichivani dan Sasana, 2019) Kenaikan pengeluaran pemerintah pada negara berkembang akan mendorong sarana dan prasarana sehingga dapat menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis

Diduga Variable Independen Belanja Pemerintah (X), berpengaruh terhadap Variable Dependen Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Kerangka Konseptual pada Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah Analisis Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa. melalui Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh variable Independen Belanja Pemerintah.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian kuantitatif Dimana data yang digunakan untuk penelitian bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik). Data ini termasuk Kabupaten Minahasa dalam Angka dan juga Sulut dalam Angka yang di di dapatkan dari website resmi BPS (Badan Pusat Statistik). untuk jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2018–2022. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif untuk menjelaskan variabel Independen Belanja Pemerintah (X) dan variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi (Y) . Dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah jenis analisis statistik yang menyelidiki bagaimana dua atau lebih variabel kuantitatif berinteraksi satu sama lain dalam upaya untuk meramalkan atau memprediksi variabel tertentu. Ada dua jenis hubungan antara dua variabel yang dapat dibedakan yaitu, hubungan fungsional dan hubungan statistik. Hubungan fungsional antara dua variabel dapat dinyatakan secara matematis; jika X variabel bebas (independent variable) dan Y variabel tak bebas (dependent variable). Analisis regresi dapat digunakan untuk tiga tujuan: 1. untuk mendeskripsikan fenomena data atau kasus yang diteliti, regresi dapat membuat model hubungan numerik untuk mendeskripsikan fenomena tersebut; 2. untuk pengendalian, regresi juga dapat digunakan untuk mengontrol suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati; dan 3. sebagai model prediksi, regresi dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang fenomena data yang akan datang. Pada analisis regresi, umumnya metode (OLS) Ordinary Least Square digunakan untuk menduga parameter. Metode ini menggunakan rata-rata untuk meminimumkan jumlah kuadrat sisaan, yang menghasilkan penduga yang baik, yang disebut BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Untuk lebih singkat penaksiran menggunakan metode OLS bersifat lebih efisien. Untuk itu model yang ada digunakan untuk melihat pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. Semua perhitungan yang dilakukan diolah dan di analisis menggunakan program Eviews12.

Model Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = f(x)$$

$$Y = f(X)$$

$$Y_i = a + \beta X_i + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi
X = Belanja Pemerintah
a = Kostanta
 β = koefisien regresi
e = standart eror

Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian. dilakukan dari uji t kemudian koefisien determinasi R². Setelah itu, dilakukan uji asumsi klasik seperti autokorelasi, heterokedastisitas, dan normalitas juga dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1. Hasil Pengolahan (Regresi)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.287798	1.383793	3.098584	0.0534
X	3.47E-13	1.71E-12	0.203345	0.8519
Adjusted R-squared	-0.315206	S.D. dependent var		2.088092
S.E. of regression	2.394675	Akaike info criterion		4.873546
Sum squared resid	17.20340	Schwarz criterion		4.717322
Log likelihood	-10.18387	Hannan-Quinn criter.		4.454254
F-statistic	0.041349	Durbin-Watson stat		1.803414
Prob(F-statistic)	0.851877			

Sumber: Olahan Data Eviews12

Hasil penelitian menghasilkan estimasi model berikut:

$$Y = 4.28779840183 + 3.46972573605e-13 \cdot X$$

Diketahui bahwa:

A = 4.287798, artinya estimasi persamaan Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa apabila nilai belanja pemerintah sama dengan Nol, maka Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 4.289 persen.

X = 3.47, artinya pengaruh tingkat belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah hubungan yang positif dimana setiap kenaikan 1 persen variabel belanja pemerintah maka variabel pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 3.47 Persen dengan asumsi variabel-variabel lain di anggap tetap (*Ceteris Paribus*). Hal ini berarti apabila semakin tinggi tingkat belanja pemerintah maka akan mengakibatkan semakin besar juga Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten minahasa dengan asumsi variabel-variabel lain di anggap tetap (*Ceteris Paribus*).

Hail Uji Heterokedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

F-statistic	4.175044	Prob. F(1,3)	0.1336
Obs*R-squared	2.909421	Prob. Chi-Square(1)	0.0881
Scaled explained SS	1.193209	Prob. Chi-Square(1)	0.2747

Sumber: Olahan Data Eviews12

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square adalah lebih tinggi dari jumlah signifikansi $\alpha = 5\%$, yang berarti 0,0881 lebih tinggi dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak ditemukan dalam data yang digunakan.

Hasil Uji Autokorelasi

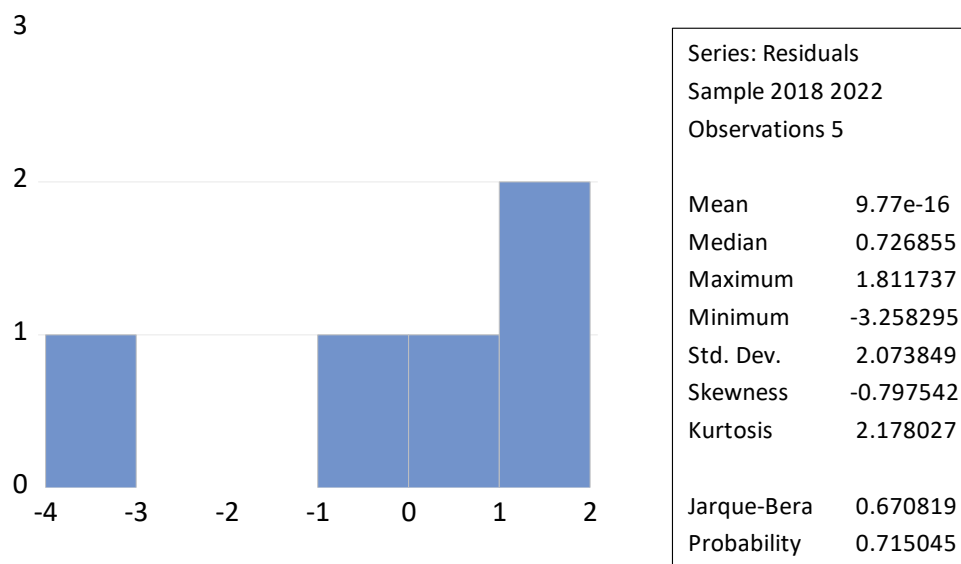
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	0.750637	Prob. F(2,12)	0.5303
Obs*R-squared	1.890314	Prob. Chi-Square(2)	0.1658

Sumber: Olahan Data Eviews12

Hasil pengujian menggunakan LM-test menunjukkan hasil pengujian Nilai probabilitas Obs*R-squared pada hasil estimasi adalah 0,1658, lebih besar dari nilai kritis yang ada pada Chi-Square Dimana pada tabelnya Tingkat kepercayaan $\alpha=0,05\%$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model persamaan penelitian ini.

Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Gambar 2 menunjukan bahwa, hasil Uji Normalitas Jarque-Berra (JB Test), Model Pertumbuhan Ekonomi Jarque-Bera 11 menunjukkan normalitas statistik sebesar 0.670819 lebih rendah dari nilai 2, dan angka probability nya yaitu 0.715045% yang dilihat lebih besar dari 0.05%. Ini menunjukkan data terdistribusikan secara normal.

Hasil Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t hitung	Probabilitas
Belanja Pemerintah	0.203345	0.8519

Sumber: Olahan Data Eviews12

Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis Ho: artinya variabel belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis H1: artinya variabel belanja pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten minahasa

Nilai t hitung yang diperoleh di persamaan ini adalah 0.203345. sementara rumus berikut dapat digunakan untuk mendapatkan nilai t tabel:

$$\begin{aligned}\text{Nilai } t \text{ tabel} &= t_{\alpha/2} (df) \\ \text{Nilai } t \text{ tabel} &= t_{0.025/n-1} = 2.776\end{aligned}$$

Dari angka di atas bisa dilihat bahwa nilai t hitung < t table, kemudian nilai probabilitas nya adalah 0.8519 lebih tinggi daripada 0,05 oleh karna itu hipotesis Ho dapat diterima. Dengan arti bahwa secara parsial variable belanja pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten minahasa.

Hasil Koefisien determinasi R²

Dari hasil estimasi, ditemukan nilai koefisien determinasi R² adalah sebesar 0.315206. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 31,52% dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh belanja pemerintah, sedangkan variabel sisa 68,48% disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan belanja pemerintah juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hal ini sudah sesuai dengan yang di tuliskan oleh (Mankiw dan Parkin 2014) yang menunjukkan bahwa belanja negara merupakan salah satu alat klasik dari pemerintah yang dianggap mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun dalam penelitian ini juga menunjukan bahwa walaupun memiliki hubungan yang positif belanja pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten minahasa, hal ini mungkin terjadi karena belanja pemerintah yang di alokasikan belum bersifat *mandatory spending*, belanja yang dialokasikan belum mampu menggairahkan perekonomian yang ada di kabupaten minahasa sehingga belanja pemerintah yang di alokasikan belum terlalu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, dan juga belanja pemerintah kabupaten minahasa yang di alokasikan bersifat investasi dimana hal ini tidak akan langsung mempengaruhi perekonomian secara signifikan di waktu yang cepat namun relative akan mempengaruhi perekonomian di masa depan. Ini sama hal nya dan juga sejalan dengan penelitian (Ramadhan & Setiadi, 2019), yang menyatakan bahwa meskipun belanja fungsi ekonomi untuk bidang infrastruktur tidak mempengaruhi indeks pembangunan ekonomi secara signifikan pada jangka pendek, itu memiliki dampak yang signifikan pada jangka panjang. Ini karena belanja dalam bidang infrastruktur tidak hanya dirasakan secara langsung saat dibuat, tetapi juga akan terlihat di jangka panjang.. Menurut penelitian dari (Meilissa, dkk 2021) menemukan bahwa belanja fungsi ekonomi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif. Menurut mereka, agar pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek dapat dicapai, pemerintah harus memperhatikan belanja yang berkualitas, termasuk pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia.

PENUTUP

Dari hasil penelitian ini, hubungan belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki arah yang positif dimana ketika belanja pemerintah meningkat akan meningkatkan pula pertumbuhan

ekonomi namun pengaruh nya tidak signifikan, di mana mungkin ada banyak variabel lain di luar model ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang menjadi keterbatasan penulis dalam penelitian kali ini, namun menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan model lain yang mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah di mana pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi belanja yang bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, karena tujuan dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentunya akan berdampak pada pembangunan yang mensejahterakan rakyat, dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah di harapkan lebih mampu untuk mengoptimalkan pengalokasian belanja agar lebih tepat sasaran dimana pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan daerahnya masing-masing begitu juga yang ada di kabupaten minahasa optimalisasi dalam pengalokasian belanja kedepannya di harapkan dapat mendorong perputaran ekonomi yang kuat sehingga melalui belanja pemerintah akan mendorong sektor-sektor ekonomi untuk terus berkembang dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat di ikuti dengan pembangunan daerah yang lebih baik dan tentunya akan lebih mensejahterakan rakyat.

REFERENSI

- Aang Curatman.,(2010). *Teori Ekonomi Makro*, Swagati Press, Yogyakarta.
- Ario Pratomo, Wahyu dan Hidayat, Paidi. (2007). *Pedoman Praktis Penggunaan EvIEWS Dalam Ekonometrika*. Cetakan Pertama. Medan. USU Press.
- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta:
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara www.bps.go.id, 2023
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Minahasa <https://minahasakab.bps.go.id>, 2023
- Ichivani, L.F., & Sasana, H. (2019). *Pengaruh korupsi, konsumsi, pengeluaran pemerintah dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN 5*. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(1), 61-72
- Mankiw, N.G (2014). *Pengantar Ekonomi Mikro. Principle of Economics*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mankiw, N.G (2020). *Principles of Microeconomics*. Cengage Learning ISBN 978-0-357-13383-5. <https://books.google.co.id/books?id=jwFFDwAAQBAJ>
- Nurmainah, S. (2013). *Analisis pengaruh belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 20, 131-141. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Romi, D.T., Debby, C.R., & George, M.V, Kaweung. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 21 No. 04 Oktober 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/36445>
- Rosen, H.S. (2014). *Public Finance, Tenth Edition, Global Edition, the McGraw-Hill Series in Economics*.
- Ramadhan, R. R., & Setiadi, Y. (2019). *Pengaruh modal fisik dan sumber daya manusia terhadap indeks inklusif di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17(2), 109-124. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9797>
- Safitri, M., Ananda, C., & Prasetya, F. (2021). *Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(2), 85-96. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Sukirno, Sadono (2000). *Pengantar Teori Makroekonomi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. STIE YKPN.
- Sukirno, Sadono. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumodiningrat, G., (2007). *"Ekonometrika Pengantar"*. Yogyakarta: BPFE.

- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi* (edisi kesembilan, jilid I). Jakarta : Erlangga
- Wahyudi. (2020). *Pengeluaran Pemerintah dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020 SBN:978-602-53460-5-7
<https://feb.untan.ac.id/wpcontent/uploads/2020/12/Wahyudi.pdf>
- Widarjono., A 2018. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Edisi keli. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.